



RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

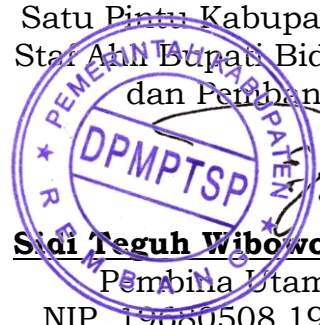
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas petunjuk-NYA, kami dapat menyusun Renja DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024. Renja DPMPTSP Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kerja DPMPTSP Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang 2023 tanggal 1 Juli 2022, atas Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 s.d 2026, Renstra DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran , serta perkiraan maju. Selain itu dalam Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja DPMPTSP Tahun 2022 , dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancanagan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.



Dengan penyusunan Rancangan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, kami berharap dapat memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang, 10 Agustus 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rembang
Star Aini Bupati Bidang Ekonomi
dan Pembangunan


Sidi Teguh Wibowo, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680508 199703 1 005



DAFTAR ISI		Hal
HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
DAFTAR TABEL		
DAFTAR GAMBAR		
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2-6
	1.3 Maksud dan Tujuan	6-7
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAERAH TAHUN 2022	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	8-25
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Rembang	25-30
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kab. Rembang	31-35
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	35-46
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	47-50
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP	50-54
	3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan	55-57
BAB IV	RENCANA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN REMBANG	58
BAB V	PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Juni DPMPTSP Kab. Rembang	8
Tabel 2.2 Realisasi Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2022	17
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kab. Rembang	28
Tabel 2.4 Review terhadap Rancanagan Awal RKPD Tahun 2024 Kab. Rembang	36
Tabel 2.5 Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Rembang.....	46
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	52
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Dalam rangka mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang, semua Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang wajib menyusun dokumen Rancanangan Awal Rencana Kerja (Renja). Ranwal Renja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena di dalam renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Daerah ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Selain itu Ranwal Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah.

Secara hirarki penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana kerja pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD), Renja SKPD



mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang tahun 2024 merupakan kewajiban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang. Hal ini dilakukan selain mengakomodir perubahan nomenklatur, juga untuk dapat menerapkan dan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan kepala daerah yang tertuang dalam penjabaran tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang sebagaimana diinginkan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Rembang. Rancangan Akhir Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DPMPTSP Kabupaten Rembang di dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kabupaten Rembang.

1.2. Landasan Hukum

- (1). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- (2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
- (3). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja



- Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- (4). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - (5). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - (6). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
 - (7). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - (8). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - (9). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



- (10). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- (11). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (12). Peraturan Presiden No 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- (13). Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (14). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- (15). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (16). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (17). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- (18). Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (19). Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
- (20). Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Rembang;
- (21). Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- (22). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 16 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
- (23). Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Rembang;
- (24). Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang;
- (25). Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;



- (26). Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2025;
- (27). Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Rembang;
- (28). Peraturan Bupati No. 19/2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
- (29). Rancangan RPJMD Teknokratik Kabupaten Rembang Tahun 2021-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah :

- (1). Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- (2). Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur;
- (3). Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.



- (4). Penyesuaian rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2024 merupakan langkah adaptasi program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah :

- (1). Menjamin tersusunya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik secara terukur;
- (2). Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang dengan arahan strategis visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kabupaten Rembang;
- (3). Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evakuasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2024

BAB V : Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Rembang tahun 2023 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2023. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang



bersangkutan. Adapun rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra DPMPTSP tahun 2023 sebagaimana tabel 2.1



Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022 Dpmpstsp Kabupaten Rembang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9)	10=(9/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	01			PROGRAM PENUNNJIANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	74 angka	73 angka			100	74 angka	100
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Keselarasan Perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	100	100
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100	2 dok	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Tahun 2023			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18	01	2.01	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	7 dok	5 Lap	3 Lap	100	5 Lap	100
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dok Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	50	50	100	100
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 org	22	22	22	100	22	100
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan ASN	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	100
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap keuangan akhir tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Akhir tahun SKPD	1 lap	1 lap	12 lap	-	-	1 lap	100
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap keuangan akhir tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Akhir tahun SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	6	50	12 lap	100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Tahun 2023			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9)	10=(9/4)
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	% Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	-	-	-	-	-
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	1 Lap	-	-	-	-	-
2	18	01	2.05		Amiistrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100
2	18	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	100	-	-	-	-	-
2	18	01	2.05	03	Pendataan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 org	58 org	-	-	-	-	-
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100	100	100				
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	35	1 pkt	100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Tahun 2023			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	50	1 pkt	100
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	50	1 pkt	100
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100	1 pkt	100
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100	1 pkt	100
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dok	100	1 dok	1 dok	50	1 dok	100
2	18	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan material yang disediakan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100	1 pkt	100
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	2 Lap	1 lap	50	2 Lap	100
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prontase ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur		100	100	-	-	-	-
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan			5 unit				



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Tahun 2023			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9)	10=(9/4)
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			20 unit				
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya		100	8 unit			-	-
2	18	01	2.07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95	100	100	100	100	100	100
2	18	01	2.07	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	1 lap	100	100	100	100
2	18	01	2.07	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100	1 lap	100	100	100	100
2	18	01	2.07	03	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 pkt	-	1 lap			1 pkt	100
2	18	01	2.07	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	100	2 Lap		100	100	100
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase BMD yang terpelihara dengan baik	100	100	95	95	100	295	201
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kend Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	27 unit	100	22 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Tahun 2023			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9)	10=(9/4)
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	3	100	3	3	100	3	100
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jml perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal		324	50 perusahaan	162 perusahaan	324%	150	100
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	Jumlah Rekomendasi Laporan hasil evaluasi penanaman modal yang di tindaklanjuti		100	50 perusahaan	1 dok	100	1 dok	100
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mendapatkan kemudahan berusaha		-	50 perusahaan			50 keg usaha	100%
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab Kota	Jumlah profil investasi		1 dok	1 dok	1	100	1 dok	100
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisa kelayakan usaha Jumlah profil investasi		1 dok	1 dok 1 pkt		100	1 dok	100
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Pertumbuhan Investor		16,32	5%				100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Tahun 2023			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9)	10=(9/4)
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang mnejadi kewenangan daerah Kab/kota	Peningkatan Jumlah Investor		100	5 %			5	100
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		100	1 kali 1 pkt				100
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	% penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan % penyelesaian permohonan perijinan dan non peizinan sesuai SOP		100	100 75			100	100
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satupintu di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan Daerah /Kab	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan		100	75%			75%	100
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektornik		100	600 pelaku usaha			600 pelaku usaha	100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Tahun 2023			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9)	10=(9/4)
2	18	04	2.01	03	Pelayanan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jml orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pint		100	8 orang	5 org	62%	5 org	62 org
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% investor yang taat peraturan		50%	55%	50	100	50	100
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kanupaten/kota	Jumlah Investor/Perusahaan yang taat pada peraturan pelaksanaan penanaman modal		50	100 perusahaan		100	92	100
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang telah dibina atas pelaksana an penanaman modal		50 pelaku usaha	50 perusahaan	50 perusahaan	100	50 perusahaan	100
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	-		100 perusahaan	25 perusahaan	25	50	100
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elekrtonik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang di olah , dikaji dan di manfaatkan	1 dok	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	100



Tabel. 2.2
Realisasi Kinerja dan Keuangan DPMPTSP
Kabupaten Rembang Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
							Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)
1					2	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9	$10=(9/8)*100$
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7.739.383.000	7.223.400.834	93,33
2	18	01			PROGRAM PENUNNANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	69,50			6.460.312.750	6.157.787.320	95,32
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Keselaran Perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%	56.480.000	52.375.623	92,72
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	2 dok	2 dok	100%	18.000.000	16.760.123	93,11
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	4 dok	4 dok	100	18.980.00	18.085.000	95,28
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	7 laporan	100	19.500.000	17.530.500	89,90
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100	100	100	4.512.200.040	4.338.170.929	96,14
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 org/bl	41 Org/bln	100	4.363.820.040	4.192.256.729	55,65
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan ASN	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian	1 dok	1 dok	100	145.380.000	144.468.000	99,37
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1 lap	1 lap	100	1.500.000	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
							Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)
1					2	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/8)*100
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan yang disusun tepat waktu	1 lap	1 lap	100	1.500.000	1.446.200	96,41
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Prosentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik Jumlah dok penatausahaan BMD	2 dok 2 dok	2 dok 2 dok	100 100	1.500.000	1.376.000	91,73
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah	1pkt	1pkt	100	1.500.000	1.376.000	91,73
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100%	100%	100%	155.860.000	150.229.994	93,39
2	18	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	4 unit	4 unit	100	25.000.000	23.935.000	95,74
2	18	01	2.05	03	Pendataan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dok	4 dok	100	5.200.000	4.545.000	87,40
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	38 org	40 org	100%	125.660.000	121.749.994	96,89
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100	100	100	205.987.273	191.814.425	93,12
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 pkt	1 pkt	100	5.000.000	4.971.000	99,42
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 pkt	1 pkt	100	20.000.000	19.314.000	96,57
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 pkt	1 pkt	100	11.000.000	10.870.500	98,82
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 pkt	1 pkt	100	20.000.000	18.347.000	91,74
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 pkt	1 pkt	100	10.230.313	9.896.700	96,74

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
							Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2022	Proyeksi Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	JUmlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dok	2 dok	100	22.256.000	17.680.000	79,44
2	18	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 paket	1 paket	100	17.500.000	17,382.500	99,33
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	100	100.000.000	93.352.725	93,35
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prontase ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	90%	100	1.037.159.418	987.145.727	95,18
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	2 unit	100	340.732.000	322.951.146	94,78
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor lainnya yang disediakan	5 unit	5 unit	100	696.427.418	664.194.581	95,37
2	18	01	2.07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95	95	100	445.852.019	397.108.037	89.07
2	18	01	2.07	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	100	2.500.000	2.400.000	100
2	18	01	2.07	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100	17.014.019	11.790.037	69,30
2	18	01	2.07	03	Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100	18.540.000	14.579.000	78,64
2	18	01	2.07	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100	407.798.000	368.239.000	90,30
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase BMD yang terpelihara dengan baik	100	100	100	45.274.000	39.566.565	87,39
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan jabatan yang diperliharan dan dibayarkan pajaknya	27 unit	27 unit	100	44.020.000	38.312.585	87,03

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
							Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2022	Proyeksi Realisasi Triwulan II Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)
1					2	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9	$10=(9/8)*100$
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	100	1.254.000	1.254.000	100
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jml perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	50		100	50.000.000	49.525.000	99,56
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	Drsf dokumen regulasi yang tersusun	1 dok	1 dok	100	10.000.000	9.656.000	96,56
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	50 keg usaha			10.000.000	9.656.000	96,56
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab Kota	Jumlah profil investasi	1 dok	1 dok	100	40.000.000	39.869.000	99,67
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten / kota	3 dok	1 dok		40.000.000	39.869.000	99,67
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Pertumbuhan Investor	5%	5	100	100.000.000	97.303.900	97,30
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman kabupaten/kota	1 dok		100	100.000.000	97.303.900	97,30
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan sesuai sop	73%	73%	100	687.497.250	536.918.381	78,10
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satupintu di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan Daerah /Kab	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	85 %	85%	100	687.497.250	536.918.381	78,10
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha berintergrasi secara elektronik	50 pelaku usaha	18.559		396708.590	326.698.510	72,24

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
							Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2022	Proyeksi Realisasi Triwulan II Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)
1					2	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/8)*100
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Pelayanan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan ,asyarakat terhadap pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan	10 org	12 Orang	120	235.260.000	210.219.871	89,16
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% investor yang taat peraturan	50%	50	100	416.573.000	356.397.233	85,67
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	% investor/perusahaan yang taa aturan tentang pelaksanaan penanaman modal	92		100	416.575.000	356.397.233	85,67
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	JUmlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	75 keg usaha		100	12.138.000	10.235.000	84,32
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	200 pelaku usaha		100	289.055.000	274.100.233	94,83
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koodinasi dan singkronisasi pengawasan	50 keg usaha	45	90	115.380.000	72.562.000	62,89
2	18	05			PROGRAM PENGELOLAAN DATTA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang deikelola dengan bail	60%	60	100	25.000.000	14.969.000	99,88
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kab/kota	Jumlah informasi dan laporan penanaman modal)	1 dok	1 dok	100	25.000.000	14.969.000	99,88
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elekrtonik	Jumlah data dan informasi operijinan dan non perijinan berbasis system pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang di olah, di kaji dan dimanfaatkan	1 dok	1 dok	100	25.000.000	14.969.000	99,88

Dari data sebagaimana tabel 2.1 dan diperjelas dengan tabel 2.2 tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Rembang
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dengan 6 indikator kinerja program, dan 12 kegiatan dengan 12 indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 6 indikator kinerja program, 1 indikator capaian target sudah memenuhi, dengan tingkat capaian realisasi target Renstra 100%
 - c) Dari 12 indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target 6 indikator kegiatan
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2022 sampai dengan Tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Rembang
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 6 indikator program dan 13 kegiatan dengan 13 indikator.
 - b) Dari 6 indikator kinerja program yang telah memenuhi target 1 indikator program
 - c) Dari 13 indikator kinerja kegiatan, terdapat 6 indikator yang telah melampaui target.
- 3) Perkiraan capaian Target Indikator Sasaran dan Indikator Tujuan/urusan (IKU) dalam Renstra yang menjadi Indikator Kinerja Utama DPMPTSP.

Dilihat dari tabel 2.2. diatas pada tahun 2023 terdapat 5 program. Hal ini dilakukan sebagai upaya sinkronisasi Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2023 yang berpedoman pada Kemendagri 050-5889 tentang Nomenklatur dan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. Dengan harapan



semua target indikator program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 yang ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 dapat tercapai.

Dari segi anggaran pada tahun 2023 terdapat penurunan. Pada tahun 2022 anggaran senilai Rp. 7.739.383.000 dan pada tahun 2023 senilai Rp. 5.537.522.800.

Pada dasarnya sebagian besar kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan terserap masih di bawah 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan oleh sisa belanja tidak langsung (gaji & tunjangan), sisa kontrak, dan adanya efisiensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.

Pada tahun anggaran 2022, DPMPTSP Kabupaten Rembang memiliki total anggaran sebesar Rp. 7.739.383.000. Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.513.525.040 dan belanja langsung sebesar Rp. 3.225.857.088. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdiri dari 7 program / 15 kegiatan.

Sedangkan pada tahun anggaran 2023 DPMPTSP Kabupaten Rembang memiliki total anggaran sebesar Rp. 5.376.522.800,-. Dari jumlah tersebut, belanja tidak



langsung sebesar Rp 2.389.365.300,- dan belanja langsung sebesar Rp 2.987.157.500,-. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdiri dari 5 program / 13 kegiatan. Anggaran yang terserap dari total anggaran sampai dengan semester 1 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.724.596.478 atau sekitar 32%

Secara garis besar capaian kinerja keuangan dan fisik merupakan sokongan untuk mencapai target indikator urusan, indikator program dan indikator kegiatan. Pencapaian indikator urusan yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) merupakan satu hal yang penting mengingat peran dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan Urusan Penanaman Modal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang

Penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Sesuai Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Tenaga Kerja;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu;
- 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 7) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang Pemerintahan dalam hal ini urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel berikut:.

DPMPTSP Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya untuk memastikan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berjalan optimal, berkesinambungan dan sinergis. Upaya tersebut diwujudkan dalam kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Rembang dirumuskan dan

dikaji berdasarkan format tabel T-C.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun capaian kinerja untuk sasaran, urusan yang mendukung urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan diampu oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang sebagaimana dalam Bab. IV Renstra DPMPTSP Kab. Rembang tahun 2021-2026 dan Bab VIII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.



Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Rembang

No	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TUJUAN									
	Renstra 2020-2021									
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	85%	85%	85%						
2.	Realisasi Investasi Baru PMA dan PMDN	10 T	10 T	10 T						
	SASARAN									
3.	% Peningkatan Tenaga Kerja yang terserap pada Penanaman Modal	5-15	5-15	5-15						
	% Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	7-10	7-10	7-10						
4.	% Peningkatan Pelayanan Perizinan	100	100	100						
	PROGRAM, KEGIATAN									
I	NILAI SAKIP	NA	67,98	73						
1	Prosentase Keselarasan perencanaan terhadap capain perangkat daerah	95	95	95						
2	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95	95	95						
3	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegwaian	95	95	95						
4	Persentase Ketercapaian Pelayanan umum	95	95	95						
5	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana	95	95	95						
6	Jumlah Infomrasi yang disampaikan ke Publik	3-4	3-4	3-4						
I	Prosentase Pertumbuhan Investor	5-10	5-10	5-10						
7	Jumlah Profil Investasi	2 dok	2dok	2 dok						
8	Jumlah Promosi Investasi	2 keg	2 keg	2 keg						
9	Jumlah Investor/perusahaan yang taat pada aturan tentang pelaksanaan penanaman modal	100	100	100						
III	Persentase penyelesaian permohonan ijin sesuai sop	100	100	100						
10	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan	1	1	1						
11	Jumlah Penyelesaian permohonan ijin sesuai sop	520	520	520						
12	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang terlayani	8	8	8						
	Renstra 2021-2026									
.	SASARAN									
1.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	1 T	1.108T	1.132T	1.280T	994 M	1,65 T	11,6 T		
2.	Indek Kepuasan Masyarakat	85	85	85	85	86	92,68	92		



	PROGRAM KEGIATAN									
I	NILAI SAKIP	73	73	73	73	69	72			
1	% Keselarasan Perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100		
1	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	2	2	2	2	100	100	2	2	
2	Jumlah Dokumen anggaran yang disusun	2	2	2	2	100	100	2	2	
3	Jumlah Dokumen Lap Kinerja yang disusun	7	7	7	7	100	100	7	7	
2	Prosentase pemenuhan pelayanan keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	% ASN yang terlayani Gaji	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan yang disusun	1dok	1dok	1dok	1dok	100	100	1dok	1dok	
6	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1dok	1dok	1dok	1dok	100	100	1dok	1dok	
7	Jumlah laporan bulanan yang disusun tepat waktu	12dok	12dok	12dok	12dok	100	100	12dok	12dok	
3	% Dokumen Penatausahaan BMD dengan kualitas baik	2dok	2dok	2dok	2dok	100	100	2dok	2dok	
8	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt	100	100	1pkt	1pkt	
4	% Pemenuhan pelayanan Pegawai	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Jumlah Dokumen manajemen kepegawaian yang dekola dengan baik dalam pelayanan kepegawaian	58org	58org	58org	58org	100	100	58org	58org	
10	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian dikelola dengan baik	4dok	4dok	4dok	4dok	100	100	4dok	4dok	
11	% ASN yang mengikuti diklat teknis	75%	75%	75%	75%	100	100	75%	75%	
5	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt	100	100	1pkt	1pkt	
11	% Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan	95%	95%	95%	95%	100	100	95%	95%	
12	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistic kantor	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	% Pemenuhan pelayan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt	100	100	1pkt	1pkt	



16	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan perjalanan dinas aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase ketercukupan sarana dan prasarana	90%	90%	90%	90%	100	100	90%	90%	
17	Terlaksananya pengadaan perlatan dan mesin lainnya	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt	100	100	1pkt	1pkt	
18	Tercukupinya sarana dan prasarana MPP	-	1pkt	1pkt	1pkt	-	100	1pkt	1pkt	
20	Tercukupinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1pkt	1pkt	1pkt	1pkt	100	100	1pkt	1pkt	
VII	% BMD yang yang terpelihara dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100	
21	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	100	100	17 unit	17 unit	
22	JUmlah Dokumen Pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	100	3 unit	3 unit	
VIII	Draf Dokumen Regulasi yang tersusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	100	1 dok	1 dok	
23	% calon investor yang terfasilitasi	75%	75%	75%	75%	100	100	75%	75%	
IX	Jumlah Profil Investasi	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100	100	3 dok	3 dok	
X	Prosentase promosi penanaman modal	5%	5%	5%	5%	100	100	5%	5%	
	% PENYELESAIAN PERMOHONAN PERIJINAN DAN NON PERIZINAN SESUAI SOP	73%	73%	73%	73%	100	100	73%	73%	
	%Persentase Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinan	85%	85%	85%	85%	100	100	85%	85%	
	Jumlah Penyelesaian Permohonan Iji	750ijin	750ijin	750ijin	750ijin	100	100	750ijin	750ijin	
	Tersusunnya dokumen IKM Penyelesaian Pengaduan yang terlayani	17 dok	17 dok	17 dok	17 dok	100	100	17 dok	17 dok	
	% INVESTOR YANG TAAT ATURAN	50%	50%	50%	50%	100	100	50%	50%	
	Persentase investor/perusahaan yang taat aturan tentang pelaksanaan penanaman modal	92%	92%	92%	92%	100	100	92%	92%	
	Jumlah Perusahaan yang telah di lakukan Pemantauan	72	72	72	72	100	100	72	72	
	Jumlah Perusahaan yang telah dibina atas pelaksanaan penanaman modal	200	200	200	200	100	100	200	200	
	Jumlah Perusahaan yang terawasi atas pelaksanaan penanaman modal	50	50	50	50	100	100	50	50	
	% LAPORAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIKELOLA DENGAN BAIK	60%	60%	60%	60%	100	100	60%	60%	
	Jumlah Informasi dan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	100	1 dok	1	



	laporan penanaman modal								dok	
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran DPMPTSP sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya mencapai Tujuan tersebut memiliki indikator kinerja yaitu :

 - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi nilai capaian 92,68 (capaian 108%) sudah tercapai.

2. Meningkatkan Investasi Daerah .Indikator capaian kinerja yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu:

 - Investasi Baru PMA dan PMDN dengan realisasi capaian 1.6 T (capaian 165%) sudah tercapai.
- b. Sasaran DPMPTSP:

1. Meningkatnya Nilai Investasi , Indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah dengan realisasi kinerja 11.793.734.125.609 (capaian 16.32%) sudah tercapai.

2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai SOP, indikator Presentase Peningkatan Pelayanan Perizinan, realisasi kinerja 100% (capaian 100%) sudah tercapai

Pada prinspnnya capaian kinerja urusan Penanaman Modal menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yaitu indicator Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap pada Penanaman Modal. Indikator menunjukkan ada peningkatan dapat dilihat dari capaian indikator Kinerja Utama DPMPTSP tahun 2022 yaitu Realisasi Investasi baru PMA dan PMDN (tabel. 2.2).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Pengembangan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. Akan tetapi dinamika eksternal yang berupa tantangan dan peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar kendali instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang. Meskipun demikian, faktor eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah (SKPD).

Secara umum, tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang ke depan adalah sebagai berikut :

A. Urusan penanaman modal

Beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan urusan penanaman modal di Kabupaten Rembang adalah

- (1). Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang;
- (2). Semakin tingginya harapan peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan nasional;
- (3). Semakin banyaknya perizinan yang menjadi kewenangan dan dilimpahkan ke DPMPTSP Kabupaten Rembang akibat berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;

- (4). Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
- (5). Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.
- (6). Semakin kompetitifnya daerah tujuan penanaman modal Apabila Kabupaten Rembang tidak mampu menghadapi tantangan ini, konsukwensinya sangat besar, mulai dari hilangnya kesempatan kerja dan transfer teknologi yang tentu akan berakibat pada lambatnya penurunan kemiskinan.

Adapun peluang yang ada untuk dapat meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Rembang antara lain:

- (1). Menjadi daerah tujuan utama penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah karena lokasinya yang strategis dan biaya tenaga kerja yang masih murah jika dibandingkan daerah lainnya
- (2). Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap penanaman modal;
- (3). Iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Rembang ;
- (4). Posisi geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi nasional yang semakin baik;
- (5). Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pimpinan daerah dan dukungan pemerintah pusat;
- (6). Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.

Berangkat dari telaahan kondisi penanaman modal di Kabupaten Rembang baik dari tantangan dan peluang, maka dirumuskan isu-isu strategis kedepan yaitu:

1. Urusan Penanaman Modal

Untuk lebih meningkatkan minat para investor dalam melakukan penanaman modal di Jawa Tengah, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang telah menginventarisir isu-isu strategis. Adapun isu-isu strategis tersebut mencakup:

- a. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM, dan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- b. Peningkatan Daya Tarik Penanaman Modal Belum optimalnya tindak lanjut kerjasama di bidang penanaman modal; promosi investasi dan daya tarik serta daya dukung investasi, persentase kerjasama di bidang investasi yang ditindak lanjuti sebesar 16,32 pada tahun 2022. Jumlah investor cenderung naik pada tahun 2021 sebesar 10,1 T dengan 99 investor dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 167 investor dengan total investasi sebesar 11,6 T Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah;
- c. Peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkan sistem yang transparan berbasis teknologi informasi.

Dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Rembang telah didukung dengan pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar pelaku usaha dapat terfasilitasi dengan baik dalam pelaksanaan usahanya di Kab. Rembang. Saat ini pemerintah telah resmi meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disebut sebagai OSS (online single submission) pada tanggal 9 Juli 2018 sebagai tindak lanjut dikeluarkannya PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kemudian harus diikuti oleh setiap Pemerintah Daerah dengan menyediakan aplikasi perizinan secara mandiri atau dengan langsung menggunakan aplikasi si Cantik Cloud yang difasilitasi oleh Kemenkominfo dan terintegrasi dengan aplikasi OSS.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Pada Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2022 evaluasi fokus pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022. Evaluasi yang dilakukan adalah pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dikaitkan dengan pencapaian dan target Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun review terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel 2.4. dibawah ini :



Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Rembang

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				6.653.344.065					6.653.344.065	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REMBANG		Nilai SAKIP	69,50	4.781.354.065	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Rembang	Nilai SAKIP	69,50	4.781.354.065	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	100	100.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang	% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	100	100.000.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dok perencanaan perangkat daerah	2 dok	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dok perencanaan perangkat daerah	2 dok	35.000.000	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jml dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	4 dok	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jml dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	4 dok	20.000.000	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	45.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 lap	45.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								SKPD			
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Dok Pelaporan Keuangan dengan Baik	100%	2.526.854.065	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Dok Pelaporan Keuangan dengan Baik	100%	2.526.854.065	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jml org yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 org/bl	2.336.854.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jml org yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 org/bl	2.336.854.000	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD		Jml dok penatausahaan yang disusun	12 dk	175.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD		Jml dok penatausahaan yang disusun	12 dk	175.000.000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jml Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun	1 lap	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jml Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun	1 lap	5.000.000	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Lap keu bulanan/triwulan/se mesteran SKPD		Jm Lap keu bulanan/triwulan /semesteran dan lap koordinasi penyusunan lap keuan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD	12 lap	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Lap keu bulanan/triwulan/ semesteran SKPD		Jm Lap keu bulanan/triwulana n/semesteran dan lap koordinasi penyusunan lap keuan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	12 lap	10.000.000	
2.18.01.2	Administrasi Barang Milik Daerah		Prosentase dokumen Penata Usahaan BMD dengan kualitas baik	100	25.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah		Prosentase dokumen Penata Usahaan BMD dengan kualitas baik	100	25.000.000	
2.18.01.2.1.01	Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan barang Milik Daerah	2 dok	25.000.000	Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan barang Milik Daerah	2 dok	25.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	%	180.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	%	180.000.000	
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 unit	60.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 unit	60.000.000	
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dok	20.000.000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dok	20.000.000	
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 orang	100.000.000	
2.18.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		% Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	401.000.000	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		% Pemenuhan Pelayanan Umum	100	401.000.000	
2.18,01,2,06.01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	7.500.000	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	7.500.000	
2.18,01,2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	140.160.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	140.160.000	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	30.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	22.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	22.000.000	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	2 dok	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2 dok	4.000.000	
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan /Material		JUmlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 paket	40.000.000	Penyediaan Bahan /Material		JUmlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 paket	40.000.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 laporan	150.000.000	
2.18.01.17.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	95%	150.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	95%	150.000.000	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		JUmlah unit Peralatan dan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		JUmlah unit Peralatan dan dan mesin lainnya yang disediakan		50.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor lainnya		JUmlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Gedung lainnya yang disediakn	unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor lainnya		JUmlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Gedung lainnya yang disediakn		100.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	1.138.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.138.500.000	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan surat menyurat	12 laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan surat menyurat	12 laporan	3.500.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	360.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	360.000.000	
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	85.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	85.000.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	690.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	690.000.000	
2.18.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD yang terpelihara dengan Kondisi Baik	%	260.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD yang terpelihara dengan Kondisi Baik	%	260.000.000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	16 unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	16 unit	60.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah dokumen pemeliharaan yang dikelola dengan baik	unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah dokumen pemeliharaan yang dikelola dengan baik	unit	200.000.000	
2.18.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	perusahaan	109.890.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		JUmlah Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi penanaman Modal yang ditindak lanjuti		99.900.000	
2.18.2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal		Draf dokumen regulasi yang tersusun	dokumen	16.500.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi laporan hasil evaluasi penanaman mid a yang ditindak la juti		15.000.000	
2.18.2. 2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal		Jumlah perusahaan yang mendapatkan kemudahan berusaha	50 perusahaan	16.500.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal		Jumlah perusahaan yang mendapatkan kemudahan berusaha	50 perusahaan	15.000.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Provil Investasi	1 dok	93.390.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Provil Investasi	1 dok	93.390.000	
2.18.02.2.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota		Jumlah dokumen profil investasi yang tersusun	1 dok	93.390.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota		Jumlah dokumen profil investasi yang tersusun	1 dok	93.390.000	
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Prosentase pertumbuhan investor	%	130.900.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Prosentase pertumbuhan investor	%	130.900.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.03. 2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase promosi penanaman modal	%	130.390.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase promosi penanaman modal	%	130.390.000	
2.18.03 2.01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanam modal kabupaten/kota	1 dok	130.900.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanam modal kabupaten/kota	1 dok	130.900.000	
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		% Penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP % penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	%	1.485.200.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		% Penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP % penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	%	1.485.200.000	
2.18.04. 2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan seacra terpadu satu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	75%	1.485.200.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan seacra terpadu satu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	75%	1.485.200.000	
2.18.04 2.01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis system pelayanan Perizinan		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Pelaku usaha	844.200.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis system pelayanan		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Pelaku usaha	844.200.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Berusaha Terintegasi secara elektronik		berbasis system pelayanan Perizinan Berusaha Terintegasi secara elektronik			Perizinan Berusaha Terintegasi secara elektronik		berbasis system pelayanan Perizinan Berusaha Terintegasi secara elektronik			
2.18.4. 2.01. 03	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan		Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	12 org	641.000.000	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan		Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	12 org	641.000.000	
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		% Investor yang taat aturan		146.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		% Investor yang taat aturan		394.800.000	
2.18.05. 2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase investor/perusahaan yang taat aturan tentang pelaksanaan penanaman modal	90%	146.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase investor/perusahaan yang taat aturan tentang pelaksanaan penanaman modal	90%	146.000.000	
2.18.05. 2.01. 01	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha daripelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantaun	Kegiatan usaha	10.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha daripelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantaun	Kegiatan usaha	10.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pelaksanaan penanaman modal					pelaksanaan penanaman modal			
2.18.05. 2.01. 02	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku usaha	60.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku usaha	60.000.000	
2.18.05. 2.01. 03	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi sinkronisasi pengawasan	Kegiatan usaha	76.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi sinkronisasi pengawasan	Kegiatan usaha	76.000.000	

Secara umum, rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang tahun 2024 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan DPMPTSP. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika Rancangan Awal program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 050 5889 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang	MPP Kab Rembang			
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah	MPP Kab Rembang		300..000.000.000	
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MPP Kab Rembang		300..000.000.000	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MPP Kab Rembang	% Pemenuhan pelayanan umum	100.000.000	
	Penyediaan Komponen instalasi listrik Penerangan bangunan kantor	MPP Kab Rembang	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penerangan tempat kerja	100.000.000	Guna menunjang dikarenakan harus sesuai dengan instalasi jaringan listrik

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan. Oleh karenanya menjadi hal yang penting adanya harmonisasi antara renstra kelembagaan dengan pemerintah dengan renstra pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini adalah keselarasan antara renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dengan Kementerian Tenaga Kerja.

3.1.1 Telaah Renstra BKPM RI

Visi BKPM tahun 2020-2024 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan public yang prima

Penguatan investasi ditempuh melalui kebijakan yaitu **pertama** adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian

target penanaman modal, dan **kedua** adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, KPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.
2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang

berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

3.1.2 Telaah Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-2 yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta misi ke-3 yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”.

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi ke-2 : “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran”

Tujuan : Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi

Strategi yang dilakukannya itu Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah. Dengan Arah Kebijakan Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsive terhadap perubahan kebijakan nasional dan global.

2. Misi ke-3 : “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”

Tujuan : Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, tersertifikasi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima. Maka strategi yang dilakukan yaitu:

- a. Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
- c. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara PTSP.

Dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan, dan kepastian serta transparansi proses perizinan.
- b. Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten / kota

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Rembang. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. mengacu pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan Misi III

Dalam melaksanakan Misi III yaitu ***“Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan”*** maka : tujuan yang ditetapkan : ***“Terwujudnya Pembangunan ekonomi Daerah”***

Sasaran:

Meningkatnya pertumbuhan sector unggulan dan peran investasi terhadap ekonoi daerah

Indikator Sasaran :

Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik

Tujuan Misi III

Dalam melaksanakan Misi III yaitu ***“Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif”***, tujuan yang ditetapkan adalah: Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan. Sasaran : Meningkatnya nilai investasi

Indikator Sasaran: Realisasi investasi PMA dan PMDN
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rembang sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Pertumbuhan Serktor Unggulan dan Peran investasi terhadap ekonomi daerah		Persentase Pertumbuhan realisasi penanaman modal/investasi	%	5	5	6%	6,27	6,54	7,32	8,28
	Meningkatnya Penanaman Modal	Nilai Investasi Penanaman Modal	T	1	1	1.108	1.192	1.282	1.379	1.484
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	%	85	85	85	86	87	88	89

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Kabupaten Rembang dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif,akuntabel, transparan dan partisipatif

Strategi : Mewujudkan Pelayanan Publik Prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik, dan melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Arah Kebijakan : Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi

Tujuan 3 : Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan

Strategi : Meningkatkan daya saing investasi melalui promosi investasi secara berkelanjutan berbagai media, menyediakan dan menyederhanakan pelayanan investasi serta pemberian insentif atau keringan pajak bagi investor.

Arah Kebijakan :

- (1). Peningkatan promosi dan kemitraan investasi
- (2). Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi

Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang, sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya dituangkan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DPMPTSP KABUPATEN REMBANG

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif,akuntabel, transparan dan partisipatif	Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima	Mewujudkan Pelayanan Publik Prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik, dan melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala	Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi
Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya nilai Investasi	Meningkatkan daya saing investasi melalui promosi investasi secara berkelanjutan berbagai media, menyediakan dan menyederhanakan pelayanan investasi serta pemberian insentif atau keringan pajak bagi investor.	Peningkatan promosi dan kemitraan investasi



3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024

Untuk dapat menjawab dinamika kebijakan terkait teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang , maka disusun prioritas program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024.

Sedangkan untuk program dan kegiatan serta sub kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 6. Penyediaan Bahan Material
 7. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 2. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik
 3. Penyediaan dan pengolahan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko
 4. Pemantauan , analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko

V. PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
 2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 3. Pengawasan Penanaman Modal

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Rembang adalah sejumlah 5 program urusan Penanaman Modal serta 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dengan total sebesar Rp.

3.733.171.283,- terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 2.277.081.283,- dan belanja operasional senilai Rp1.456.090.000,-

Adapun rincian anggaran berdasarkan urusan adalah sebagai berikut : . Rincian rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 3.3 sebagai berikut :



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
REMBANG

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Rembang.



Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPSTSP Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6,7					
2.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				3.733.171.283				7.845.000.000
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REMBANG	Nilai SAKIP	Kab.Rembang	69,50					
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	Kab.Rembang	100					
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan perangkat daerah	Kab.Rembang	2 dok	2.500.000			2 dok	50.000.000
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Kab.Rembang	4 dok	5.000.000			2 dok	30.000.000
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Rembang	4 lap	2.500.000			2 dok	55.000.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dok Pelaporan Keuangan dengan Baik	Kab.Rembang	100%					
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jml org yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab.Rembang	23 org/bl	2.277.081.283			23 org	3.000.000.000
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Rembang	1 lap				1 lap	8.000.0000
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kab.Rembang	12 lap				12 lap	15.000.000

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
2.18.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	% Pemenuhan Pelayanan Umum	Kab.Rembang	100%	401.000.000			100%	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab.Rembang	1 paket	5.000.000			1 paket	30.000.000
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab.Rembang	1 paket	7.000.000			1 paket	30.000.000
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Rembang	1 paket	34.475.000			1 paket	125.000.000
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Rembang	1 paket	3.025.000			1 paket	25.000.000
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Kab.Rembang	2 dok	4.000.000			2 dok	5.000.000
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab.Rembang	1 paket	10.000.000			1 paket	45.000.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Rembang	40 laporan	40.000.000			40 laporan	200.000.000
2.18.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Kab.Rembang	95%				95%	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Gedung lainnya yang disediakn	Kab.Rembang	unit	150.000.000			unit	100.000.000
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab.Rembang	%				%	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan surat menyurat	Kab.Rembang	12 laporan	1.000.000			12 laporan	5.000.000
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakn	Kab.Rembang	12 laporan	294.000.000			12 laporan	400.000.000
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab.Rembang	12 laporan	70.000.000			12 laporan	100.000.000

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab.Rembang	12 laporan	604.800.000			12 laporan	900.000.000
2.18.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD yang terpelihara dengan Kondisi Baik	Kab.Rembang	%	260.000.000			%	80.000.000
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	Kab.Rembang	16 unit	14.040.000			16 unit	
2.18.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	Kab.Rembang	perusahaan	109.890.000			perusahaan	
2.18.2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Draf dokumen regulasi yang tersusun	Kab.Rembang	dokumen	16.000.000	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil		dokumen	45.000.000
2.18.2. 2.01.003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan kemudahan berusaha	Kab.Rembang	50 perusahaan	16.000.000			50 perusahaan	45.000.000
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase pertumbuhan investor		%	14.000.000			%	150.000.000
2.18.03. 2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase promosi penanaman modal	Kab.Rembang	%	14.000.000			%	150.000.000
2.18.03 2.01. 002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupagten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanam modal kabupaten/kota	Kab.Rembang	1 dok	14.000.000	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 dok	150.000.000
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	% Penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP % penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	Kab.Rembang	%				%	
2.18.04. 2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan seacra terpadu satu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	Kab.Rembang		1.485.200.000				
2.18.04 2.01. 005	Koordinasi dan Sinkronisasi		Kab.Rembang		30.000.000	Dana Tranfer			900.000.000

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kunerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					Umum-Dana Bagi Hasil			
2.18.4. 2.01. 006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berudaha mealuli sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik		Kab.Rembang		65.250.000	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil			650.000.000
2.18.4. 2.01. 007	Penyediaan dan pengolahan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko		Kab.Rembang		20.000.000	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil			450.000.000
2.18.4. 2.01. 008	Pemantauan , analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berisaha berbasis resiko		Kab.Rembang		23.000.000	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil			300.000.000
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% Investor yang taat aturan	Kab.Rembang		146.000.000				
2.18.05. 2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor/perusahaan yang taat aturan tentang pelaksanaan penanaman modal	Kab.Rembang	90%	146.000.000			90%	
2.18.05. 2.01. 004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		Kab.Rembang	Kegiatan usaha	5.000.000			Kegiatan usaha	40.000.000
2.18.05. 2.01. 005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Kab.Rembang	Pelaku usaha	20.000.000			Pelaku usaha	65.000.000
2.18.05. 2.01. 006	Pengawasan Penanaman Modal		Kab.Rembang	Kegiatan usaha	15.000.000			Kegiatan usaha	60.000.000



BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Dengan ditetapkannya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang tahun 2024, maka dalam penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS akan dilakukan dengan dasar pada isi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang tahun 2024 ini. Kebutuhan dana/pagu indikatif dimaksud dalam rancangan akhir renja ini masih dapat berubah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah serta penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten Rembang dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2024. Melalui dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program /kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2024.

Rembang, 10 Agustus 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rembang
Sta Ahli Bupati Bidang Ekonomi
dan Pembangunan


Sidi Teguh Wilowo, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680508 199703 1 005

